MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Jl. Veteran No. 18 KAB. LAMONGAN

JAWA TIMUR

http://www.pn-lamongan.go.id/

==========

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,57 / 89,29%

Jumlah	103 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 61	
	PEREMPUAN : 42	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 4	Diploma 2 : 0
	SD : 9	Diploma 3 : 1
	SMP : 14	S1 : 29
	SMU : 40	S2 : 6
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 1	SWASTA : 66
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 3
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 33	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ? 3,447
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ? 3,476
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ? 3,495

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Melakukan inventarisir dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan yang memerlukan perbaikan dan melakukan perawatan secara berkala terhadap sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar masyarakat semakin mudah dan nyaman ketika di lingkungan Pengadilan.
2. Memberikan pelatihan atau peningkatan kompetensi kepada petugas PTSP agar selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masayarakat pengguna layanan. dan selalu menerapkan Salam, Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun (5S).
3. Melakukan evaluasi terkait layanan informasi biaya panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Lamongan pada website atau papan pengumuman agar bisa diakses dan mudah dimengerti oleh pengguna layanan pengadilan, serta mengintruksikan kepada para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP tidak meminta biaya apapun selain biaya resmi yang telah ditetapkan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 April 2024

Ketua Pengadilan Negeri

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Jl. Veteran No. 18 KAB. LAMONGAN
JAWA TIMUR
http://www.pn-lamongan.go.id/

==========

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,69 / 92,31%

Jumlah	103 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 63	
	PEREMPUAN : 40	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 4	Diploma 2 : 0
	SD : 9	Diploma 3 : 1
	SMP : 13	S1 : 32
	SMU : 39	S2 : 5
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 1	SWASTA : 67
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 2
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 33	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3,544
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,592
3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? 3,592

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. 1. Memberikan intruksi terhadap para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP untuk bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. dan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang berlaku pada Pengadilan Negeri Lamongan.
   2. Melakukan evaluasi terkait layanan informasi biaya panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Lamongan pada website atau papan pengumuman agar bisa diakses dan mudah dimengerti oleh pengguna layanan pengadilan, serta mengintruksikan kepada para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP tidak meminta biaya apapun selain biaya resmi yang telah ditetapkan.
   3. Memberikan intruksi terhadap para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP untuk tidak menjanjikan apapun terkait pengurusan produk Pengadilan, dan Memberikan hukuman kepada pegawai yang terbukti menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan, serta selalu mengingatkan kepada semua pegawai untuk tidak menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 April 2024
Ketua Pengadilan Negeri

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
Jl. Veteran No. 18 Telp: 321351, 321024, (Fax) 311551
Web : www.pn-lamongan.go.id E-mail : pn.lamongan@gmail.com
L A M O N G A N

EVALUASI
3 UNSUR TERENDAH NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Pada hari ini Selasa 16 April 2024 telah diteliti 3 Unsur terendah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Lamongan, pada triwulan Ke I (satu) tahun 2023 Periode 01 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024 dengan nilai sebesar 3,57/89,29% dengan jumlah responden sebanyak 103 orang.

Berikut Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur sebagai berikut :

NO	UNSUR PERTANYAAN	NILAI
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?	3,44
2	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	3,47
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?	3,49

A. Rekomendasi

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambil keputusan (decision maker) dan pimpinan unit pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP.

B. Tindak Lanjut

1. Melakukan inventarisir dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan yang memerlukan perbaikan dan melakukan perawatan secara berkala terhadap sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar masyarakat semakin mudah dan nyaman ketika di lingkungan Pengadilan.
2. Memberikan pelatihan atau peningkatan kompetensi kepada petugas PTSP agar selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masayarakat pengguna layanan. dan selalu menerapkan Salam, Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun (5S).
3. Melakukan evaluasi terkait layanan informasi biaya panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Lamongan pada website atau papan pengumuman agar bisa

diakses dan mudah dimengerti oleh pengguna layanan pengadilan, serta mengintruksikan kepada para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP tidak meminta biaya apapun selain biaya resmi yang telah ditetapkan.

Ketua,
Pengadilan Negeri Lamongan

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
Jl. Veteran No. 18 Telp: 321351, 321024, (Fax) 311551
Web : www.pn-lamongan.go.id E-mail : pn.lamongan@gmail.com
L A M O N G A N

EVALUASI
3 UNSUR TERENDAH NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Pada hari ini Selasa 16 April 2024 telah diteliti 3 Unsur terendah nilai Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Lamongan pada triwulan pertama tahun 2024 Periode 01 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024 dengan nilai sebesar 3,69/92,31% dengan jumlah responden sebanyak 103 orang.

Berikut Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur sebagai berikut :

NO	UNSUR PERTANYAAN	NILAI
1	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,65
2	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,70
3	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	3,70

A. Rekomendasi

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambil keputusan (decision maker) dan pimpinan unit pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP, aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tindak Lanjut

1. Memberikan intruksi terhadap para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP untuk bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. dan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang berlaku pada Pengadilan Negeri Lamongan.
2. Melakukan evaluasi terkait layanan informasi biaya panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Lamongan pada website atau papan pengumuman agar bisa diakses dan mudah dimengerti oleh pengguna layanan pengadilan, serta mengintruksikan kepada para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP tidak meminta biaya apapun selain biaya resmi yang telah ditetapkan.

3. Memberikan intruksi terhadap para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP untuk tidak menjanjikan apapun terkait pengurusan produk Pengadilan, dan memberikan hukuman kepada pegawai yang terbukti menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan, serta selalu mengingatkan kepada semua pegawai untuk tidak menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan.

Ketua,
Pengadilan Negeri Lamongan

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
Jl. Veteran No. 18 KAB. LAMONGAN
JAWA TIMUR
http://www.pn-lamongan.go.id/

==========

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,17 / 79,13%

Jumlah	69 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 37	
	PEREMPUAN : 32	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 7	Diploma 2 : 0
	SD : 4	Diploma 3 : 0
	SMP : 2	S1 : 20
	SMU : 33	S2 : 1
	Diploma 1 : 1	S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 2	SWASTA : 21
	TNI : 1	WIRAUSAHA : 12
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 33	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? 3,101
2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3,116
3. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? 3,130

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. 1. Memberikan intruksi terhadap para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP untuk tidak menjanjikan apapun terkait pengurusan produk Pengadilan, dan Memberikan hukuman kepada pegawai yang terbukti menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan, serta selalu mengingatkan kepada semua pegawai untuk tidak menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan.
   2. Memberikan intruksi terhadap para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP untuk bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. dan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang berlaku pada Pengadilan Negeri Lamongan.
   3. Memberikan intruksi terhadap para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP, untuk tidak menerima dan/atau meminta pemberian apapun dari pengguna layanan pengadilan selain dari biaya resmi yang sudah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku. dan agar tidak menjadi budaya yang dianggap wajar di Pengadilan Negeri Lamongan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 Juli 2024
Ketua Pengadilan Negeri

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Jl. Veteran No. 18 KAB. LAMONGAN

JAWA TIMUR

http://www.pn-lamongan.go.id/

==========

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,33 / 83,14%

Jumlah	71 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 38	
	PEREMPUAN : 33	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 6	Diploma 2 : 0
	SD : 4	Diploma 3 : 0
	SMP : 1	S1 : 21
	SMU : 35	S2 : 1
	Diploma 1 : 2	S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 2	SWASTA : 22
	TNI : 1	WIRAUSAHA : 11
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 35	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ? 3,197
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ? 3,197
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ? 3,197

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Melakukan Monev terhadap SOP Pengadilan Negeri Lamongan agar bisa memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat, dan mengintruksikan kepada suluruh hakim dan pegawai agar bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, serta tidak menunda pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya.
2. Mengintruksikan kepada seluruh hakim dan pegawai terutama bagian PTSP agar tidak meminta biaya, selain biaya yang sudah ditetapkan secara resmi oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku. dan akam memberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku jika ada hakim atau pegawai yang terbukti meminta imbalan atau tambahan biaya selain yang ditetapkan.
3. Melakukan uji petik terhadap kecepatan dan ketepatan layanan yang berkaitan dengan masyarakat, apakah sudah sesuai dengan SOP. dan Memberikan pelatihan atau peningkatan kompetensi kepada petugas PTSP agar selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masayarakat pengguna layanan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 Juli 2024

Ketua Pengadilan Negeri

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
Jl. Veteran No. 18 Telp: 321351, 321024, (Fax) 311551
Web : www.pn-lamongan.go.id E-mail : pn.lamongan@gmail.com

EVALUASI
3 UNSUR TERENDAH NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Pada hari ini Senin 01 Juli 2024 telah diteliti 3 Unsur terendah nilai Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Lamongan pada triwulan kedua tahun 2024 Periode 01 April 2024 sampai 30 Juni 2024 dengan nilai sebesar 3,17/79,13% dengan jumlah responden sebanyak 69 orang.

Berikut Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur sebagai berikut :

NO	UNSUR PERTANYAAN	NILAI
1	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3,10
2	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,11
3	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3,13

A. Rekomendasi

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambil keputusan (decision maker) dan pimpinan unit pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP, aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tindak Lanjut

1. Memberikan intruksi terhadap para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP untuk tidak menjanjikan apapun terkait pengurusan produk Pengadilan, dan Memberikan hukuman kepada pegawai yang terbukti menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan, serta selalu mengingatkan kepada semua pegawai untuk tidak menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan.
2. Memberikan intruksi terhadap para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP untuk bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. dan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang berlaku pada Pengadilan Negeri Lamongan.

3. Memberikan intruksi terhadap para Hakim dan para Pegawai serta petugas PTSP, untuk tidak menerima dan/atau meminta pemberian apapun dari pengguna layanan pengadilan selain dari biaya resmi yang sudah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku. dan agar tidak menjadi budaya yang dianggap wajar di Pengadilan Negeri Lamongan..

Ketua,
Pengadilan Negeri Lamongan

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
Jl. Veteran No. 18 Telp: 321351, 321024, (Fax) 311551
Web : www.pn-lamongan.go.id E-mail : pn.lamongan@gmail.com

EVALUASI
3 UNSUR TERENDAH NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Pada hari ini Senin 01 Juli 2024 telah diteliti 3 Unsur terendah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Lamongan, pada triwulan Kedua tahun 2024 Periode 01 April 2024 sampai 30 Juni 2024 dengan nilai sebesar 3,33/83,14% dengan jumlah responden sebanyak 71 orang.

Berikut Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur sebagai berikut :

NO	UNSUR PERTANYAAN	NILAI
1	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	3,19
2	Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?	3,19
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	3,19

1. **Rekomendasi**

   Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambil keputusan (decision maker) dan pimpinan unit pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP.

2. **Tindak Lanjut**

   Dari hasil 3 (tiga) unsur terendah, maka perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan yang dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur pelayanan terendah yakni:

   a. Melakukan Monev terhadap SOP Pengadilan Negeri Lamongan agar bisa memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat, dan mengintruksikan kepada suluruh hakim dan pegawai agar bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, serta tidak menunda pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

   b. Mengintruksikan kepada seluruh hakim dan pegawai terutama bagian PTSP agar tidak meminta biaya, selain biaya yang sudah ditetapkan secara resmi oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku. dan akam memberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku jika ada hakim atau pegawai yang terbukti meminta imbalan atau tambahan biaya selain yang ditetapkan.

c. Melakukan uji petik terhadap kecepatan dan ketepatan layanan yang berkaitan dengan masyarakat, apakah sudah sesuai dengan SOP. dan Memberikan pelatihan atau peningkatan kompetensi kepada petugas PTSP agar selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masayarakat pengguna layanan.

Ketua,
Pengadilan Negeri Lamongan

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.